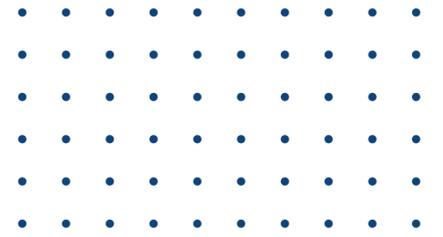


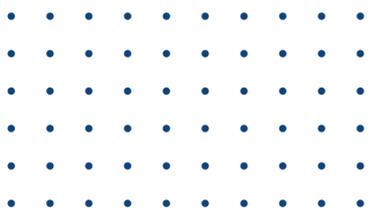


PEMERINTAH
KABUPATEN
TOBA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOBA



2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum OPD dan Cakupan Pelayanannya

Dinas Sosial Kabupaten Toba mengemban tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Toba di Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Toba No. 70 Tahun 2016, yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas, pokok dan fungsi yaitu: melaksanakan urusan Pemerintah di bidang sosial dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan fungsi sbb:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi lainnya.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba, dimana terbentuk dinas teknis yang menangani khusus untuk bidang Sosial.

1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d

angka 6, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
- b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;

- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Sosial;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Restorasi Sosial;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

2.1.2 Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing- masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dinas Sosial sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

sosial.

- 2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- 4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Cakupan Layanan Dinas Sosial

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan sosial dengan kegiatan pokok: Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT, Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini di tujukan untuk peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap PMKS dengan kegiatan pokok: Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan

Pengemis dan Masyarakat.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan pokok: Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Penanganan Bencana

Program ini di tujukan untuk penanganan bencana dengan kegiatan pokok: Penyediaan Sandang, , Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program ini ditujukan untuk memelihara sarana dan prasarana makam pahlawan

5. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa

Program ini di tujukan untuk penguatan idiologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan dengan kegiatan pokok: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa

1.4 Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Toba pada Dasarnya adalah :

- Tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti Rumah Singgah ataupun panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah sehingga orang-orang dengan gangguan jiwa tidak tertangani secara maksimal.
- Terdapat beberapa TKSK yang tidak sesuai dengan kriteria dan kurang memiliki jiwa sosial sehingga pendataan dan pendampingan terhadap masyarakat menjuadi tidak maksimal di tiap Kecamatan.
- Kurangnya kelengkapan identitas para PMKS yang hendak dibantu sehingga menghambat proses pemberian bantuan baik untuk diikuti sertakan sebagai penerima BPJS Kesehatan maupun untuk diinput ke Basis Data Terpadu (BDT)

- Tidak ada penanganan langsung oleh Psikolog terhadap korban yang mengalami masalah Psikologi
- Solusi Hendaknya adanya kerjasama yang baik dengan Dinas terkait , sehingga identitas setiap PMKS yang akan menerima bantuan bisa lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga.
- Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki Identitas seperti KTP/KK dan identitas lainnya
- SDM tenaga kerja lapangan kurang dan kurangnya staf di bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Tidak validnya data dari desa / kelurahan sehingga membuat rancu dalam pemberian bantuan social dari Kementerian baik BST dan BPNT.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2024. Rencana strategis berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Toba agar efektif, efisien dan akuntabel. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Toba memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Toba tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan daripembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang- undang RI nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Toba dengan fokus pada 6 (enam) permasalahan sosial yakni **Kemiskinan, Ketelantaran, Disabilitas, Ketunaan Sosial, Keterpencilan, Korban Bencana**, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi daerah yang di satu sisi muncul dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berbagai problematikanya.

Dinas Sosial Kabupaten Toba sebagai Perangkat Daerah (PD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip **to help people to help**

themselves (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri), menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri untuk kesejahteraan hidupnya.

Indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba adalah **mengurangi populasi PMKS dengan meningkatkan kualitas hidup PMKS serta meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat baik perorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru di Kabupaten Toba untuk periode 2021- 2026, sehingga RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Toba mengakibatkan perubahan visi dan misi memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan daerah maupun antar daerah yang penjabarannya diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 juga ditetapkan bahwa Kabupaten atau Kota memiliki Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menjadi acuan pembangunan masa 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu kepada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Dinas Sosial Kabupaten Toba sebagai Perangkat Daerah (PD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga PMKS mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya. Indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba. Sekaitan hal tersebut, Kabupaten Toba menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana

Kerja (Renja) tahunan.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma yaitu pembangunan yang menekankan pada peningkatan keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan yang memiliki makna aspiratif/*bottom up* yang tinggi dalam kehidupan demokrasi tanpa terlepas dari aspek nasional, efisien, efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba untuk pembangunan jangka menengah dengan visi Kabupaten Toba sebagai berikut: **Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar**, dengan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan infrastruktur yang mantap dan merata;
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan handal;
3. Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera;
4. Menciptakan kesehatan yang prima dan terjangkau;
5. Membangun pariwisata berkat dan meriah;
6. Membangun iman yang terpelihara;
7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Dengan kepribadian Batak Na Raja yang mengandung pengertian yaitu **Marugamo, Maradat, Maruhum dan Marparbinotoan**. Dinas Sosial Kabupaten Toba menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 s/d 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Toba ini antara lain :

1. Menetapkan arah kebijakan program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Dinas Sosial Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam penilaian kinerja.
4. Merumuskan isu-isu strategis di Dinas sosial 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan external.

Perencanaan Kinerja Dinas Sosial adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang di inginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan. Di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam setiap Prpgram/ kegiatan dimaksud.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU adalah alat yang penting dalam manajemen kinerja pemerintahan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja suatu OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Toba sesuai Renstra sebagai berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
		2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang Tertangani	18,59 %	23,48 %	31,32 %
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19,85 %	24,76 %	32,92 %

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab

secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di OPD masing-masing. Dengan adanya perjanjian kinerja ini menjadi patokan dan tolak ukur bagi setiap organisasi yang dilakukan bagi setiap akhir periode pelaksanaan.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kami menyadari masih terdapat ketidaktepatan dalam penentuan sasaran, di mana indikator kinerja dan target yang ditetapkan belum sepenuhnya selaras. Beberapa target yang ditentukan bahkan lebih rendah dari realisasi dan capaian yang telah dicapai, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kinerja optimal dari Dinas Sosial Kabupaten Toba. Namun, pada kenyataannya, Dinas Sosial senantiasa bergerak aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Toba, baik dalam bidang kesejahteraan sosial maupun perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Ke depannya, hal ini akan menjadi perhatian utama kami agar setiap perencanaan dalam penentuan target, realisasi, dan capaian dapat diperhitungkan dengan cermat serta diukur hasilnya secara lebih akurat. Ke depan, hal ini akan menjadi perhatian utama kami agar setiap perencanaan dalam penentuan target, realisasi, dan capaian dapat diperhitungkan secara cermat serta diukur hasilnya dengan lebih akurat.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Toba.
2. Menetapkan tolak ukur kinerja yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur.
3. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar dalam pemberian penghargaan maupun sanksi.
4. Sebagai pedoman bagi pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap perkembangan serta kemajuan kinerja penerima amanah guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

Adapun Perjanjian Kinerja pada masing-masing sasaran, secara umum diuraikan dalam table 2.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan kesejahteraan PMKS	1 . Persentase PMKS yang telah tertangani	77.01 %
		2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	32.92
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B/66,50

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba untuk Tahun Anggaran 2024 didukung juga dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.239.940.421,-. Adapun keseluruhan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Toba pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.262.699.754,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.765.912.366,- atau sebesar 90,56%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Dinas Sosial Kabupaten Toba selaku pengemban tugas dibidang sosial melaksanakan kewajiban penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian sasaran dengan target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Toba. Adapun hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Kesejahteraan PMKS	1 . Persentase PMKS yang telah tertangani	77.01%	77,72%	100,92%
		2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	32.92%	7,53%	22,87%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B/66,50	B/69,75	100%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam Analisis Capaian Kinerja ini, Dinas Sosial Kabupaten Toba dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba.

Analisis atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Toba berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Dinas Sosial tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Toba telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi serta capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Mewujudkan Kesejahteraan PMKS

a. Indikator 1 Persentase PMKS yang telah tertangani

Sasaran 1 yaitu Mewujudkan Kesejahteraan PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang telah tertangani. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran : 1. Persentase PMKS yang telah tertangani

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PMKS yang telah tertangani	23,48%	77,01%	327,98%	77,01%	77,72%	100,92%

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga atau kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar. Berdasarkan tabel 3.2, persentase PMKS yang telah tertangani tahun 2024 terealisasi sebesar 77,72% dari target 77,01%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,92%. Capaian terget mencapai 100,92% disebabkan karena adanya komitmen pimpinan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khusus, masyarakat rentan/kurang mampu. Untuk lebih jelasnya capaian terget sebesar 100,92% dengan persentase penanganan PMKS sebesar 100,92%

dapat dijelaskan dengan rumus dan tabel berikut :

$$\text{Target Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Target Kinerja} &= \frac{97.633}{52.557126.771} \times 100\% \\ &= 77,01\% \end{aligned}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{93.677}{120.529} \times 100\% \\ &= 77,72\% \end{aligned}$$

Tabel 3.3

Persentase PMKS yang telah tertangani di Kabupaten Toba Tahun 2024

No.	Jumlah PMKS	Jumlah yang ditangani	Persentase PMKS yang tertangani
1	2	3	4= (3/2) x 100%
1	120.529 orang	93.677 orang	77,72 %

Tecapainya target kinerja PMKS yang dapat menjalankan fungsi sosial serta terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100,92% dari jumlah total PMKS yang ada di Kabupaten Toba disebabkan karena komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan, bantuan sosial serta perlindungan dan jaminan sosial kepada PMKS di Kabupaten Toba.

b. Indikator 2 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Sasaran 2 yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.4 berikut:

$$\text{Target Kinerja} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Target Kinerja} &= \frac{500}{1519} \times 100\% \\ &= \mathbf{32,92\%} \end{aligned}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Target Kinerja} &= \frac{181}{2041} \times 100\% \\ &= \mathbf{27,80\%} \end{aligned}$$

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran : 2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan	24,76%	27,80%	112,28%	32,92%	7,53%	22,87%

	Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Dari data ini terlihat bahwa pada tahun 2023, realisasi pencapaian lebih tinggi dari target. Sementara itu, untuk tahun 2024, target yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tetapi realisasi sementara masih rendah. Capaian kinerja tahun 2024 yang masih rendah dibandingkan target dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Capaian kinerja tahun 2024 yang masih rendah dibandingkan target dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, yang berdampak pada berbagai aspek pelaksanaan program. Dengan anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat yang bisa dijangkau oleh program bantuan sosial menjadi lebih sedikit dibandingkan target yang ditetapkan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya kegiatan sosialisasi dan pendataan, sehingga masih banyak penerima manfaat yang belum terjangkau.

Tabel 3.5

No.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
1	2	3	4= (3/2) x 100%
1	181 orang	2.401 orang	7,53 %

Tabel diatas menunjukkan data mengenai jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani di Kabupaten Toba. Dari total populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis sebanyak 2.401 orang, hanya 181 orang yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berdasarkan perhitungan, persentase PMKS yang tertangani adalah 7,53%, yang menunjukkan bahwa masih banyak individu dalam

kategori ini yang belum mendapatkan intervensi atau bantuan yang diperlukan.

Penjabaran terkait target kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Table 3.6

Target, Realisasi, serta persentase Capaian Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	100%	94,45%	94,45%
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	66,67%	66,67%	66,67%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	20 Orang/bulan	66,67%
3.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100%
4.	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Unit	2 Unit	100%

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
5.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	100%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23 Unit	23 Unit	100%
II.	Program Pemberdayaan Sosial	100%	98,04%	98,04%
1.	<i>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota</i>	100%	98,04%	98,04%
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	17 Orang	16 Orang	94,11%
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Keluarga	14 Keluarga	100%

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30 Sertifikat	30 Sertifikat	100%
III.	Program Rehabilitasi Sosial	100%	95,24%	95,24%
1.	<i>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	100%	90,48%	90,48%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	38 Orang	38 Orang	100%
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35 Orang	25 Orang	71,43%
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100 Orang	100 Orang	100%
2.	<i>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS DAN NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	100 Orang	100 orang	100%
IV.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%
1.	<i>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</i>	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	35.000 Orang	39.593 Orang	100%
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	100 Orang	100%
	- Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	30 Orang	30 Orang	100%
V.	Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%
1.	<i>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	65 Orang	215 Orang	330,76%
2.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	19 Orang	19 Orang	100%
VI.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%
1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam	100%

1. Program Rehabilitasi Sosial

As Program Rehabilitasi Sosial ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun target dan capaian program ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Table 3.7**Target, Realisasi, serta persentase Capaian Program Rehabilitasi Sosial**

Program	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi	Capaian
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	32,92%	7,53%	22,87%

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2024, yang diukur berdasarkan persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 32,92%, namun realisasi yang dicapai baru mencapai 7,53%. Hal ini menyebabkan capaian terhadap target sebesar 22,87%, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara target yang telah ditentukan dan realisasi yang berhasil dicapai. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, yang berdampak pada berbagai aspek pelaksanaan program. Dengan anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat yang bisa dijangkau oleh program bantuan sosial menjadi lebih sedikit dibandingkan target yang ditetapkan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya kegiatan sosialisasi dan pendataan, sehingga masih banyak penerima manfaat yang belum terjangkau. Kedepan Data ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok sasaran di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.8

Indikator Kinerja	Capaian (2022)	Capaian (2023)	Capaian (2024)
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75,01%	112,28%	22,87%

Tabel 3.8 penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022, capaian mencapai 75,01%, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2023 hingga 112,28%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 22,87%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan, anggaran, atau faktor lain yang memengaruhi distribusi jaminan sosial bagi kelompok tersebut.

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

- Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam melaksanakan aktifitas sosial sehari-hari. Pada sub kegiatan pemberian alat bantu dilaksanakan pemberian alat bantu berupa kaki palsu kepada 8 orang dan kursi roda 30 orang penyandang disabilitas disabilitas yang tersebar di wilayah Kabupaten Toba. Melalui pemberian alat bantu ini, diharapkan penerima manfaat dapat lebih mandiri serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.



- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penerima manfaat melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pada sub kegiatan ini Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial sebanyak 25 orang, Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rujukan sebanyak 12 Orang, Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga sebanyak 2 orang, dan Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Layanan Reunifikasi sebanyak 2 orang. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, diharapkan penerima manfaat dapat memperoleh dukungan yang optimal, meningkatkan keberfungsian sosialnya, serta memiliki kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

Sub kegiatan ini jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga sebanyak 100 orang lansia. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan keluarga mampu memberikan perhatian yang lebih baik serta menciptakan kondisi yang lebih layak dan sejahtera bagi anggota keluarga yang membutuhkan.



b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS DAN NAPZA di Luar Panti Sosial.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

Pada pelaksanaannya, sub kegiatan ini telah berhasil memberikan bimbingan sosial kepada 100 keluarga penerima manfaat.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau keluarga dalam menghadapi risiko sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka, seperti kemiskinan, kecelakaan, penyakit, kehilangan pekerjaan, atau usia lanjut. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Tabel 3.9

Program	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	77,01 %	77,72%	100,92%

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2024, yang diukur berdasarkan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil tertangani. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 77,01%, sedangkan realisasi yang dicapai melebihi target, yaitu sebesar 77,72%. Hal ini menghasilkan capaian sebesar 100,92%, yang menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan efektif dan mampu melampaui target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini mencerminkan upaya yang optimal dalam menangani PMKS dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan.

Tabel 3.10

Indikator Kinerja	Capaian (2022)	Capaian (2023)	Capaian (2024)
Persentase PMKS yang tertangani	100%	327,98%	100,92%

Tabel tersebut menampilkan capaian penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam tiga tahun berturut-turut, yakni 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022, capaian tercatat sebesar 100%, yang berarti seluruh target PMKS yang direncanakan telah tertangani. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga 327,98%, yang menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang tertangani jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan drastis ini disebabkan oleh kekeliruan dalam penetapan target, sehingga realisasi yang dicapai jauh melampaui perencanaan awal. Sementara itu, pada tahun 2024, capaian kembali turun menjadi 100,92%, yang masih sedikit melebihi target yang ditetapkan. Data ini mencerminkan dinamika dalam penanganan PMKS yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan, alokasi anggaran, serta perubahan kondisi sosial di masyarakat.

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota.

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun ini, pendataan fakir miskin telah mencakup sebanyak 39.593 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota. Data yang dikumpulkan mencakup informasi demografi, kondisi ekonomi, akses terhadap layanan dasar, serta faktor lain yang berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Dengan adanya pendataan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga merupakan program yang bertujuan untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga fakir miskin dengan memberikan bantuan berupa tas ransel sebanyak 100 set. Setiap tas dilengkapi dengan buku dan alat tulis yang diperlukan untuk menunjang proses belajar di sekolah. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan semangat belajar anak-anak serta meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Diharapkan melalui program ini, anak-anak penerima manfaat dapat lebih termotivasi untuk menempuh pendidikan dengan baik dan meraih masa depan yang lebih cerah.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sub ini merupakan program yang bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan peralatan usaha. Pada tahun ini, bantuan yang diberikan berupa oven dan mixer sebanyak 30 unit. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas penerima manfaat dalam bidang usaha kuliner, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program ini juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam menghadapi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini berfokus pada penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup sosial dan budaya. Program ini biasanya melibatkan pelatihan, penyuluhan, dan pemberian sumber daya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian kelompok sasaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi secara bersama-sama.

Tabel 3.11

Program	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah	100 %	100%	100%

Program	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian
	kesejahteraan sosial			

Tabel 3.11 menunjukkan capaian Program Pemberdayaan Sosial pada tahun 2024, dengan indikator kinerja berupa persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%, dengan realisasi yang juga mencapai 100%, sehingga capaian keseluruhan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan seluruh target yang ditetapkan telah tercapai. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program dalam membina dan memberdayakan PSKS untuk berkontribusi dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat.

Tabel 3.12

Indikator Kinerja	Realisasi (2022)	Realisasi (2023)	Realisasi (2024)
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%	100%	100 %

Tabel 3.12 menunjukkan realisasi persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Dalam periode tersebut, capaian realisasi selalu mencapai 100%, yang berarti seluruh target yang ditetapkan telah berhasil direalisasikan secara penuh. Konsistensi dalam pencapaian ini menunjukkan efektivitas program pembinaan PSKS dalam mendorong partisipasi aktif dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial. Keberhasilan ini juga mencerminkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan program yang berjalan

dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut penjabaran dari program Pemberdayaan Sosial :

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya target 16 orang, dan realisasi 16 orang.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam sub kegiatan ini Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya target sebanyak 14 keluarga, realisasi 14 keluarga.

- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Sub-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat layanan sosial bagi keluarga yang menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan. Pada pelaksanaannya, sub-kegiatan ini berhasil direalisasikan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian program mencapai 100%, menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan secara optimal dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan sosial bagi keluarga yang membutuhkan.

4. Program Penanganan Bencana

Tabel 3.13

Program	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	100%	330,76%	330,76%

Tabel 3.13 menunjukkan capaian Program Penanganan Bencana pada tahun 2024 berdasarkan indikator persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang terdampak diharapkan menerima bantuan sosial. Namun, realisasi yang tercatat mencapai 330,76%, yang menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan bantuan akibat jumlah korban yang lebih besar dari perkiraan atau adanya kebijakan yang memperluas cakupan penerima bantuan. Hal ini dapat mencerminkan respons yang lebih cepat dan luas dalam penanganan bencana, namun juga bisa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan awal agar target yang ditetapkan lebih realistis di masa mendatang.

Tabel 3.14

Indikator Kinerja	Capaian (2022)	Capaian (2023)	Capaian (2024)
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa	264%	109.72%	330,76%

tanggap darurat dalam 1 tahun			
-------------------------------	--	--	--

Tabel 3.14 menunjukkan capaian dalam pemberian bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022, capaian tercatat sebesar 264%, yang berarti jumlah penerima bantuan jauh melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian mengalami penurunan menjadi 109,72%, yang menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan lebih sejalan dengan target yang direncanakan. Namun, pada tahun 2024, capaian kembali meningkat secara signifikan hingga 330,76%. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah bencana, kebijakan yang memperluas cakupan penerima bantuan, atau peningkatan efektivitas dalam distribusi bantuan sosial. Data ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial untuk korban bencana bersifat dinamis dan sangat bergantung pada kondisi darurat yang terjadi setiap tahunnya.

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Pada Sub kegiatan ini persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota sebesar 100%. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 215 orang

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 19 orang. Melalui sub-kegiatan ini, diharapkan TAGANA dapat lebih aktif dan responsif dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana serta mendukung upaya mitigasi dan penanganan darurat di wilayah yang terdampak.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel 3.15

Program	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %	100%	100 %

Tabel 3.15 menunjukkan pencapaian Program Pengelolaan Taman Makam pada tahun 2024. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase taman makam yang terpelihara dengan baik. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%, dan realisasi yang dicapai juga mencapai 100%, sehingga capaian program ini sepenuhnya sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan taman makam telah dilakukan secara optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Tabel 3.16

Indikator Kinerja	Capaian (2022)	Capaian (2023)	Capaian (2024)
Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100%	100 %	100 %

Tabel 3.16 menunjukkan data capaian pemeliharaan taman makam pahlawan selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase taman makam pahlawan yang terpelihara. Dari data yang ditampilkan, capaian pemeliharaan taman makam pahlawan konsisten mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan perawatan terhadap taman makam pahlawan telah dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Konsistensi pencapaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam menjaga kelestarian taman makam sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahan makam para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Pada pelaksanaannya, telah dilakukan pemeliharaan terhadap dua Taman Makam Pahlawan yaitu Taman Makam Sisingamangaraja dan Taman Makam Bahagia, sub kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa area tersebut tetap terawat dengan baik dan layak sebagai tempat penghormatan bagi para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP perangkat daerah. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran 3 :
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP perangkat daerah				B/66,50	B/69,75	100%

Tabel 3.6 menampilkan capaian kinerja sasaran dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah. Pada tahun 2023, kolom target dan realisasi belum terisi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah nilai B dengan skor 66,50, sedangkan realisasi melampaui target dengan nilai B dan skor

69,75. Capaian kinerja tahun 2023 tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan, efektivitas perencanaan, dan pelaksanaan kinerja di lingkungan perangkat daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 3.18

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Renstra (2024)	Realisasi (2024)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah	1. Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
		2. Program Pemberdayaan Sosial	2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Renstra (2024)	Realisasi (2024)
		3. Program Rehabilitasi Sosial	3. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	32,92 %	7,53 %
		4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4. Persentase PMKS yang Tertangani	31,23 %	77,72%
2	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	5. Program Penangan Bencana Kesejahteraan Sosial	5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Renstra (2024)	Realisasi (2024)
			dalam 1 tahun		
		6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	6. Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %	100 %

Dari tabel diatas Tabel ini menyajikan capaian kinerja strategis dalam bidang kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana untuk tahun 2024. Fokus utama adalah peningkatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana alam serta sosial.

Pada aspek pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, terdapat beberapa indikator kinerja. Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Pemberdayaan Sosial berhasil mencapai target 100%. Namun, dalam Program Rehabilitasi Sosial, realisasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis hanya mencapai 7,53%, jauh di bawah target 32,92%. Sebaliknya, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menunjukkan pencapaian yang jauh melampaui target, dengan persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani sebesar 77,72%, dibandingkan dengan target awal sebesar 31,23%. Dalam aspek penanganan korban bencana, Program Penanganan Bencana Kesejahteraan Sosial berhasil memenuhi target, dengan 100% korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Begitu juga dengan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang mencapai target 100% dalam pemeliharaan taman makam pahlawan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan keberhasilan di beberapa program, namun ada tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dalam Program Rehabilitasi Sosial, yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan layanan di masa mendatang.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Keberhasilan:

- Capaian realisasi anggaran yang hampir mencapai 100% menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terutama dalam pemberian sertifikat kepada peserta pelatihan (100%).

Kendala:

- Tidak semua kasus yang seharusnya dilaporkan ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) diteruskan ke Dinas Sosial, mengakibatkan keterbatasan dalam pendataan dan intervensi.

Alternatif Solusi:

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan manfaat layanan LK3 agar lebih banyak kasus yang dilaporkan.
- Menjalin kerja sama lebih erat dengan pihak desa dan kelurahan untuk mendorong pelaporan kasus.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Keberhasilan:

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah mencapai 100%.
- Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas mencapai tingkat realisasi anggaran sebesar 97,76%, menunjukkan manajemen anggaran yang baik.

Kendala:

- Target penyediaan alat bantu yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, karena adanya ketidaksesuaian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Rendahnya jumlah pengaduan masyarakat menyebabkan realisasi bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial hanya mencapai 71,43%.

Alternatif Solusi:

- Melakukan revisi perencanaan agar target dalam DPA lebih fleksibel terhadap kondisi riil.
- Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat layanan yang diberikan.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Keberhasilan:

- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melampaui target sebesar 113,12%.
- Bantuan sosial kesejahteraan keluarga melebihi target 200%, menunjukkan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Kendala:

- Tidak adanya penyesuaian target pada saat perubahan DPA menyebabkan realisasi yang tampak melebihi target.

Alternatif Solusi:

- Perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala agar target lebih realistis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Program Penanganan Bencana

Keberhasilan:

- Kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) berjalan dengan baik dengan realisasi 100%.

Kendala:

- Realisasi penyediaan sandang untuk korban bencana hanya mencapai 330,76% akibat bencana yang tidak terprediksi dan ketidaksesuaian target dalam DPA.

Alternatif Solusi:

- Mengembangkan sistem tanggap darurat yang lebih fleksibel dalam anggaran dan target.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap target bantuan berdasarkan potensi bencana di daerah.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Keberhasilan:

- Pemeliharaan taman makam pahlawan terlaksana dengan baik dengan realisasi 100% untuk target fisik.
- Efisiensi anggaran tetap terjaga dengan realisasi sebesar 92,79%.

Kendala:

- Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan program ini.

Alternatif Solusi:

- Menjaga keberlanjutan program dengan anggaran yang tetap optimal.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan:

- Penyediaan sarana dan prasarana kantor, termasuk listrik, peralatan, dan bahan bacaan, telah mencapai 100%.
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai target (100%).

Kendala:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN hanya mencapai 88,91% karena adanya antisipasi terhadap kemungkinan penambahan pegawai.

Alternatif Solusi:

- Menyusun rencana kepegawaian yang lebih akurat agar anggaran tidak terlalu besar dibandingkan kebutuhan nyata.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba tahun 2024 cukup baik dengan rata-rata realisasi anggaran di atas 90%. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti perencanaan yang lebih fleksibel, peningkatan sosialisasi program kepada masyarakat, dan optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk program bencana. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dari total keseluruhan anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun 2024 di dapat efisiensi (Silpa) Anggaran sebesar Rp. 496.787.388,-.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Toba didukung oleh anggaran APBD Kabupaten Toba tahun 2024 dengan pagu anggaran sampai dengan perubahan sebesar Rp. 5.262.699.754,-. Pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Toba yang terdistribusi ke beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti dalam tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.19
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3.239.940.421	2.953.601.586	91,16	286.338.835
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	34.731.600	34.569.200	99,53	162.400
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.731.600	34.569.200	99,53	162.400
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daeah</i>	2.341.994.000	2.082.319.986	88,91	259.674.014
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,341,994,000	2,082,319,986	88,91	259.674.014
3.	<i>Kegiatan Administrsi Umum Perangkat Daerah</i>	319.682.058	318.697.998	99,69	984.060
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.194.176	3.194.150	100,00	26
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.156.225	38.106.545	99,87	49,680
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.386.157	7.386.102	100,00	55
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.250.500	27.249.995	100,00	505
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	6.940.000	99,14	60.000
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.695.000	235.821.206	99,63	873.794
4.	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	35.520.000	35.130.000	98,90	390.000
	- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.520.000	35.130.000	98,90	390.000

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	275.830.000	261.386.500	94,76	14.443.500
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	9.026.500	90,27	973.500
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.830.000	252.360.000	94,93	13.470.000
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	232.182.763	221.497.902	95,40	10.684.861
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.529.300	165.208.406	96,88	5.320.894
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.400.000	6.316.647	75,20	2.083.353
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	18.280.324	15.000.000	82,06	3.280.324
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.973.139	34.972.849	100,00	290
II.	Program Pemberdayaan Sosial	189.186.896	186.612.294	98,64	2.574.602
1.	<i>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	189.186.896	186.612.294	98,64	2.574.602
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	106.303.770	105.040.070	98,81	1.263.700
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	43.901.540	42.824.090	97,55	1.077.450

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38.981.586	38.748.134	99,40	233.452
III.	Program Rehabilitasi Sosial	881.905.098	857.605.348	97,24	24.299.750
1.	<i>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	734.871.100	716.317.150	97,48	18.553.950
	- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	173.786.950	169.885.500	97,76	3.901.450
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.802.455	42.650.755	83,95	8.151.700
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	510.281.695	503.780.895	98,73	6.500.800
2.	<i>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS DAN NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	147.033.998	141.288.198	96,09	5.745.800
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	147.033.998	141.288.198	96,09	5.745.800
IV.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	338.501.954	325.352.519	96,12	13.149.435

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1.	<i>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</i>	338.501.954	325.352.519	96,12	13.149.435
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	207.712.140	199.296.005	95,95	8.416.135
	- Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	60.604.184	60.368.584	99,61	235.600
	- Sub Kegiatan Fasilitas bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	70.185.630	65.687.930	93,59	4.497.700
V.	Program Penanganan Bencana	555.344.554	389.089.750	70,06	166.254.804
1.	<i>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	486.944.554	331.489.750	68,08	155.454.804
	- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	486.944.554	331.489.750	68,08	155.454.804
2.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	68.400.000	57.600.000	84,21	10.800.000
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	68.400.000	57.600.000	84,21	10.800.000
VI.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	57.820.831	53.650.869	92,79	4.169.962
1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	57.820.831	53.650.869	92,79	4.169.962
	- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	57.820.831	53.650.869	92,79	4.169.962
TOTAL		5.262.699.754	4.765.912.366	90,56	496.787.388

1. **Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan Penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.**

Capaian Kinerja keluaran kegiatan pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Toba melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.262.699.754,- dan realisasi

sebesar Rp. 4.765.912.366,- (90,56%) dengan Rincian realisasi sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Memiliki 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 189.186.896,- dan realisasi Rp. 186.612.294,- (98,64%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

- *Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*
Sub Kegiatan ini memiliki target 17 Orang dan realisasi 16 Orang (94,12%) dengan anggaran sebesar Rp. 106.303.770 ,- dan realisasi sebesar Rp. 105.040.070,- (98,81%).
- *Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*
Sub Kegiatan ini memiliki target 14 Keluarga dan realisasi 14 Keluarga. Anggaran sebesar Rp. 43.901.540,- dan realisasi sebesar Rp. 42.824.090,- (97,55%).
- *Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*
Sub Kegiatan ini memiliki target 30 Sertifikat/orang dan realisasi 30 Sertifikat/Orang (100%). Capaian kinerja rendah dikarenakan Tidak semua kasus LK3 yang ada di kabupaten Toba dilaporkan ke Dinas Sosial. Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 38.981.586,- dan realisasi sebesar Rp. 38.748.134 ,- (99,40%)

2. Program Rehabilitasi Sosial

Memiliki 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.881.905.098,- dan realisasi Rp.857.605.348,- (97,24%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

- *Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu*
Sub Kegiatan ini memiliki target 38 Orang dan realisasi 38 Orang (38%). Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 173.786.950,- dan realisasi sebesar Rp. 169.885.500,- (97,76%). Rendahnya capaian sub kegiatan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara target yang tercantum dalam DPA, yang tidak dapat diubah, dengan rincian pelaksanaan di dalam DPA, di mana jumlah yang direncanakan adalah 38 orang, sesuai dengan realisasi yang telah dicapai.
 - *Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial*
Sub Kegiatan ini memiliki target 35 Orang dan realisasi 25 Orang (71,43%). Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.802.455,- dan realisasi sebesar Rp. 42.650.755,- (83,95%). Ketidaktercapaian target maksimal pada kegiatan ini disebabkan oleh jumlah layanan pengaduan yang diterima Dinas Sosial dari masyarakat yang hanya sebanyak 25 laporan. Hal ini justru menunjukkan hasil yang baik, karena semakin kecil jumlah pengaduan yang diterima, semakin baik pula kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan layanan ini.
Ke depan, kegiatan ini tetap memerlukan evaluasi dan sosialisasi agar dapat terus menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, sembari menjaga agar kebutuhan pengaduan tetap rendah sebagai indikator kesejahteraan sosial yang membaik.
 - *Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat*
Sub Kegiatan ini memiliki target 100 Orang dan realisasi 100 Orang (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 510.281.695,- dan realisasi sebesar Rp. 503.780.895,- (98,73%).
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*
Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :
- *Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA*

Sub Kegiatan ini memiliki target 100 Orang dan realisasi 100 Orang (100%). Realisasi melewati target dikarenakan pada saat perubahan DPA target tidak diubah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 147.033.998,- dan realisasi sebesar Rp. 141.288.198,- (96,09%).

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Memiliki 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 338.501.954,- dan realisasi Rp. 325.352.519,- (96,12%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

- *Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*
Sub Kegiatan ini memiliki target 35.000 Orang dan realisasi 39.593 Orang (113,12%%) dengan anggaran sebesar Rp. 207.712.140,- dan realisasi sebesar Rp. 199.296.005,- (95,95%).
- *Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*
Sub Kegiatan ini memiliki target 50 keluarga dan realisasi 100 keluarga (200%). Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.604.184,- dan realisasi sebesar Rp. 60.368.584,- (99,61%).
- *Sub Kegiatan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*
Sub Kegiatan ini memiliki target 30 Orang dan realisasi 30 Orang (100%). Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 70.185.630,- dan realisasi sebesar Rp. 65.687.930,- (93,59%).

4. Program Penanganan Bencana

Memiliki 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 555.344.554,- dan realisasi Rp. 389.089.750,- (70,06%), dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- *Sub Kegiatan Penyedia Sandang*
Sub Kegiatan ini memiliki target 2.603 Orang dan realisasi 215 orang (8,26%). Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 486.944.554,- dan realisasi sebesar Rp. 331.489.750,- (68,08%). Rendahnya realisasi

sub kegiatan ini disebabkan oleh adanya bencana yang tidak terprediksi pada tahun 2024, yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara target yang tercantum dalam DPA, yang tidak dapat diubah, dengan rincian pelaksanaan yang tercantum dalam DPA. Hal ini mengakibatkan realisasi yang terlihat rendah meskipun telah sesuai dengan rincian pelaksanaan yang direncanakan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- *Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*

Sub Kegiatan ini memiliki target 19 Orang dan realisasi 19 Orang (100%), dengan rincian sub kegiatan yaitu pemberian tali asih/honorarium tenaga kesejahteraan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 68.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.600.000,- (84,21%).

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Memiliki 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 57.820.831,- dan realisasi Rp. 53.650.869,- (92,79%), dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- *Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*

Sub Kegiatan ini memiliki target 2 makam pahlawan dan realisasi 2 makam pahlawan (100%), dengan anggaran sebesar Rp. 57.820.831,- dan realisasi sebesar Rp. 53.650.869,- (92,79%).

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 6 kegiatan dengan 15 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.239.940.421,- dan realisasi Rp. 2.953.601.586,- (91,16%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu

- *Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencana Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan ini memiliki target 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 34.731.600,- dan realisasi sebesar Rp. 34.569.200,- (99,53 %)

- b. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu

- *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Sub Kegiatan ini memiliki target 30 Orang/bulan dan realisasi 20 Orang/bulan (66,67%) dengan anggaran sebesar Rp. 2.341.994.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.082.319.986,- (88,91%). Capaian target kinerja rendah karena untuk mengantisipasi apabila terjadi penambahan pegawai.

- c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yaitu

- *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*

Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 3.194.176,- dan realisasi sebesar Rp. 3.194.150,- (100%)

- *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 38,156,225,- dan realisasi sebesar Rp. 38,106,545.00,- (99,87%)

- *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*

Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 7.386.157,- dan realisasi sebesar Rp. 7.386.157,- (100%)

- *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 27.250.500,- dan realisasi sebesar Rp. 27,249,995.00,- (99,99%).

- *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.940.000,- (99,14%).
 - *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
Sub Kegiatan ini memiliki target 8 laporan dan realisasi 8 laporan (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 236.695.000,- dan realisasi sebesar Rp. 235.821.206,- (99,63%).
- d. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu
- *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*
Sub Kegiatan ini memiliki target 2 Unit dan realisasi 2 Unit (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 35.520.000,- dan realisasi sebesar Rp. 35,130,000,- (98,90%).
- e. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu
- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
Sub Kegiatan ini memiliki target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.026.500,- (90,27%)
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
Sub Kegiatan ini memiliki target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 265.830.000,- dan realisasi sebesar Rp. 252.360.000,- (94,93%)
- f. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yaitu
- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
Sub Kegiatan ini memiliki target 8 unit dan realisasi 8 unit (100%) dengan

anggaran sebesar Rp. 170.529.300,- dan realisasi sebesar Rp. 165.208.406,- (96,88%)

- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.*
Sub Kegiatan ini memiliki target 12 unit dan realisasi 12 unit (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.316.647(75,20%)
- *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
Sub Kegiatan ini memiliki target 1 unit dan realisasi 1 unit (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 34.973.139,- dan realisasi sebesar Rp. 34.972.849,- (100%).
- *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
Sub Kegiatan ini memiliki target 25 unit dan realisasi 23 unit (92%) dengan anggaran sebesar Rp. 18.280.324,- dan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (82,06%).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun capaian kinerja 6 program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Toba mendukung pencapaian 6 indikator tujuan. Sebagai bahan perbaikan kedepan, akan diperhatikan untuk menetapkan target kinerja yang tepat.

Sasaran strategi Dinas Sosial Kabupaten Toba yaitu meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat dapat terlaksana dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja daerah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.262.699.754,-** (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 4.765.912.366,-** (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yaitu sebesar **90,56 %** (Sembilan Puluh koma Lima Puluh Enam Persen).

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata realisasi anggaran di atas 90%. Beberapa program seperti Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pengelolaan Taman Makam Pahlawan telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, terutama dalam fleksibilitas perencanaan anggaran, sosialisasi program kepada masyarakat, serta optimalisasi program rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Langkah-langkah yang dilakukan di masa yang akan datang

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi riil.
 - b. Meningkatkan akurasi dalam perencanaan kepegawaian untuk menghindari anggaran yang berlebih atau kurang optimal.
2. Peningkatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

- a. Mengoptimalkan sosialisasi layanan sosial kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan komunitas dan lembaga sosial dalam pelaporan kasus serta pemberdayaan masyarakat.
3. Optimalisasi Program Penanganan Bencana
- a. Mengembangkan sistem tanggap darurat yang lebih fleksibel untuk menghadapi bencana yang tidak terprediksi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Penguatan Program Rehabilitasi Sosial
- a. Memperbaiki mekanisme pendataan dan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Meningkatkan program bimbingan sosial dan rehabilitasi dengan pendekatan yang lebih proaktif..

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba dapat terus meningkat, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun 2024 ini diperbuat dengan sangat sederhana untuk menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang

Balige,²¹ Februari 2025
**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Toba,**



**Drs. LALO HARTONO SIMANJUNTAK, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670310 199203 1 004**